

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh UPT Terminal Kupang dan Dinas perhubungan Kota Kupang/ belum menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh UPT Terminal Kupang dan Dinas perhubungan Kota Kupang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Format Laporan Penerimaan Retribusi UPT Terminal Kupang

No	Hari / tanggal	Terminal atau pos pemantau	No. karcis / jumlah karcis @ 5000/karcis	Total	Keterangan

Yang menyetor
Bendahara pembantu

Yang menerima
Bendahara penerima / penyetor

Mengetahui
Kepala UPT Terminal

Sumber: UPT Terminal Kupang, 2018

Setelah dilakukan pungutan retribusi oleh JFU (Jabatan Fungsional Umum) pada terminal Kota Kupang, JFU menyetorkan hasil pemungutan ke Bendahara

Penerimaan UPT Terminal Kupang, selanjutnya bendahara penerima menyetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai PAD. Langkah selanjutnya bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Kupang menerima PAD dari bendahara UPT Terminal Kupang, selanjutnya dilakukan pencatatan secara manual yaitu belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Kupang

Ayat Penerimaan	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi			Prosentase (%)
			s/d bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d bulan ini (Rp)	
4.1.2.02.04	Retribusi jasa usaha terminal					
4.1.2.01.09	Retribusi pengujian kendaraan					
4.1.2.03.04	Retribusi ijin trayek (izidentil)					
4.1.2.02.05	Retribusi parkir khusus					
4.1.2.01.08	Retribusi parkir tepi jalan umum					
4.1.2. . .	Penerimaan lain – lain					
Jumlah						

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Kupang

Bendahara Penerima / Penyetor
Dishub Kota Kupang

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari ankot line 2 dan line 17, dengan jumlah angkot pada line 2 sebanyak 76 angkot, yang aktif berjumlah 54 angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan ankot pada line 17 berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang aktif berjumlah 8 angkot. Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun 2011 untuk tarif retribusi terminal mobil angkutan umum sebesar Rp. 5.000/hari.

5.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2014 - 2016

Penentuan target retribusi di terminal Kupang diperoleh dari jumlah angkot yang aktif beroperasi sebanyak 80 angkot dikali tarif retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000/angkot/hari (PERDA Kota Kupang No. 17 Tahun 2011) dikali jumlah hari dalam setahun.

1. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun 2014:

$$\Rightarrow 80 \text{ angkot} \times \text{Rp. } 5.000/\text{angkot/hari} \times 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 146.000.000$$

$$\Rightarrow \text{Realisasi penerimaan pada tahun 2014: Rp. } 108.520.000$$

$$\Rightarrow \text{selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. } 37.480.000$$

$$\Rightarrow \text{persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016:}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 108.520.000}{\text{Rp. } 146.000.000} \times 100\%$$

$$= 74\%$$

2. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun 2015.

$$\Rightarrow 80 \text{ angkot} \times \text{Rp. } 5.000/\text{angkot/hari} \times 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 146.000.000$$

$$\Rightarrow \text{Realisasi penerimaan pada tahun 2014: Rp. } 121.685.000$$

$$\Rightarrow \text{selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. } 24.315.000$$

$$\Rightarrow \text{persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016:}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 121.685.000}{\text{Rp. } 146.000.000} \times 100\%$$

$$= 83\%$$

3. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun 2016:

$$\Rightarrow 80 \text{ angkot} \times \text{Rp. } 5.000/\text{angkot/hari} \times 366 \text{ hari} = \text{Rp. } 146.400.000$$

$$\Rightarrow \text{Realisasi penerimaan pada tahun 2014: Rp. } 102.700.000$$

$$\Rightarrow \text{selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. } 43.700.000$$

$$\Rightarrow \text{persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016:}$$

$$= \frac{\text{Rp. } 102.700.000}{\text{Rp. } 146.400.000} \times 100\%$$

$$= 70\%$$

Tabel 5.3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2014 – 2016

Tahun Anggaran	Retribusi Terminal		Selisih (Rp)	Presentase (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2014	146.000.000	108.520.000	37.480.000	74
2015	146.000.000	121.685.000	24.315.000	83
2016	146.400.000	102.700.000	43.700.000	70

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018

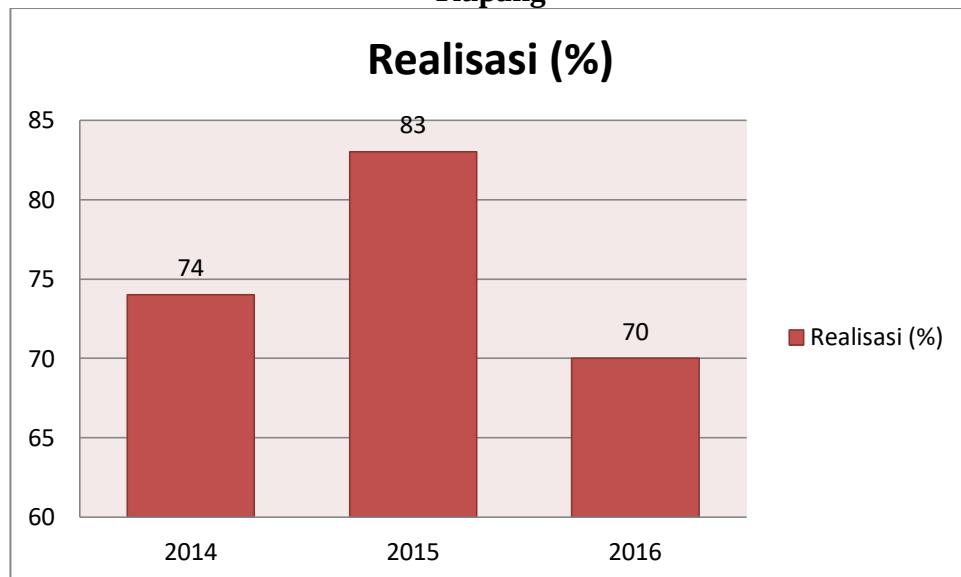
Berdasarkan tabel 5.3 diatas, Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang dari tahun anggaran 2014 sampai 2016 realisasi retribusi terminal belum mencapai target. Dilihat dari tabel Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kupang pada tahun 2014 presentase penerimaan retribusi hanya mencapai 74 % yang dikategorikan Tidak Efektif, pada tahun 2015 presentase penerimaan retribusi hanya mencapai 83 % yang dikategorikan Cukup Efektif sedangkan pada tahun 2016 presentase penerimaan retribusi hanya mencapai 70 % yang dikategorikan Tidak Efektif.

5.3 Analisis dan Pembahasan

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari angkot line 2 dan line 17, dengan jumlah angkot pada line 2 sebanyak 76 angkot, yang aktif berjumlah 54 angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan angkot pada line 17 berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang aktif berjumlah 8

angkot. Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun 2011 untuk tarif retribusi terminal mobil angkutan umum sebesar Rp. 5.000/hari.

Gambar 5.1
Presentase Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Kupang



Penyebab tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor yakni, adanya tanggal merah atau hari libur dimana angkot tidak beroperasi dan terdapat beberapa angkot yang mengalami kerusakan atau penyusutan kendaraan sehingga angkot tidak beroperasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam penerapan SAP ada 2 (Dua) basis yang harus digunakan suatu organisasi pemerintah maupun swasta yaitu berbasis AkruaI dan berbasis Kas. Berbasis akrual adalah teknik pencatatan akuntansi dimana pencatatan dilakukan ketika terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan seperti untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana, Sedangkan berbasis Kas adalah teknik pencatatan

akuntansi dimana pencatatan hanya dilakukan ketika kas diterima dan dikeluarkan seperti untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan (UU No.71 tahun 2010).

Sebagai instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib menerapkan sistem pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari 7 komponen antara lain:

- A. Laporan realisasi anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- C. Neraca
- D. Laporan operasional
- E. Laporan arus kas
- F. Laporan perubahan ekuitas
- G. Catatan atas laporan keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Format Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, sehingga Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Format Laporan Realisasi penerimaan daerah pada Dinas Perhubungan Kota Kupang seperti pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Kupang

Ayat Penerimaan	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi			Prosentase (%)
			s/d bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d bulan ini (Rp)	
4.1.2.02.04	Retribusi jasa usaha terminal					
4.1.2.01.09	Retribusi pengujian kendaraan					
4.1.2.03.04	Retribusi ijin trayek (izidentil)					
4.1.2.02.05	Retribusi parkir khusus					
4.1.2.01.08	Retribusi parkir tepi jalan umum					
4.1.2. . .	Penerimaan lain – lain					
Jumlah						

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018

Berdasarkan tabel 5.5 tersebut diatas menunjukan bahwa Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Dinas Perhubungan Kota Kupang belum menerapkan format laporan realisasi anggaran berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Seharusnya dinas perhubungan kota menerapkan laporan realisasi penerimaan sesuai format pada tabel 5.6 sebagai berikut:

TABEL 5.5

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)	xxx	xxx	xxx	xxx
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penerimaan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
72	Penerimaan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	xxx	xxx	xx	xxx
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
97	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)	xxx	xxx	xx	xxx
98	PEMBIAYAAN NETO (83 - 97)	xxx	xxx	xx	xxx
99					
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)	xxx	xxx	xx	xxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

C. Laporan operasional.

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

Dinas perhubungan kota kupang tidak membuat Laporan Operasional yang berbasis SAP, seharusnya laporan operasioanal diwajibkan untuk mencatat retribusi yang diakui sebagai pendapatan daerah.

Seharusnya dinas perhubungan kota menerapkan Laporan Operasioanal sesuai format pada tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 5.6

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
1	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
10	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN HIBAH					
14	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
16	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN					
17	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
29	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
31	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
36	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
37	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA					
38	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
40	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xxx
41	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

D. Laporan perubahan ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-Pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periodesebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Laporan Perubahan Ekuitas yang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, karena Laporan Perubahan Ekuitas berguna untuk Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periodesebelumnya.

Berikut ini format Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP):

Tabel 5.7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

E. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi

mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Neracayang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang,karenaDalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara

aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Berikut ini format Neraca berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) :

Tabel 5.8

NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)	xxx	xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	xxx	xxx

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Gandi Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)	xxxx	xxxx
54			
55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)	xxx	xxx
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)	xxx	xxx
75	JUMLAH KEWAJIBAN (66 + 74)	xxx	xxx
76	EKUITAS DANA		
77	EKUITAS DANA LANCAR		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)	xxx	xxx
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
80	Cadangan Piutang	xxx	xxx
81	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
83	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)	xxx	xxx
84	EKUITAS DANA INVESTASI		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
89	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)	xxx	xxx
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)	xxx	xxx
93	JUMLAH EKUITAS DANA (83 + 89 + 92)	xxx	xxx
94	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75 + 93)	xxxx	xxxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

F. Laporan arus kas.

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Laporan arus kas yang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, karena memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

Tabel 5.9

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
 Metode Langsung

		(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian	20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)	XXX	XXX

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

G. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan yang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, karena secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. .

Efektivitas sistem pencatatan akuntansi tidak bisa diukur karena dinas perhubungan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah.